

**KETERLIBATAN YAKUZA DALAM PERPOLITIKAN
JEPANG DARI TAHUN 1945 – 1984**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sastra.



Oleh

ARIEF FADHILAH ROSIDI

NIM.05110001

PROGRAM STUDI SASTRA JEPANG

FAKULTAS SASTRA

UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JAKARTA

2012

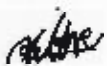
LEMBAR PERNYATAAN

KETERLIBATAN YAKUZA DALAM PERPOLITIKAN JEPANG DARI TAHUN 1945-1984

Merupakan karya ilmiah yang penulis susun dibawah bimbingan Bapak Syamsul Bahri dan Ibu Erni Puspitasari yang bukan merupakan jiplakan Skripsi Sarjana atau karya orang lain, sebagian atau seluruhnya dan isinya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis sendiri.

Nama : Arief Fadhilah Rosidi

NIM. : 05110001

Tanda tangan : 

Tanggal : 17 Juli 2017

HALAMAN PERSETUJUAN LAYAK UJI

Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Arief Fadhilah Rosidi

Nim : 05110001

Program Studi : Sastra Jepang SI

Judul Skripsi : Keterlibatan Yakuza dalam Perpolitikan Jepang dari tahun 1945-1984

telah disetujui oleh Pembimbing, Pembaca dan Ketua Jurusan, untuk diujikan di hadapan Dewan Penguji pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 pada Program Studi Bahasa dan Sastra Jepang, Fakultas Sastra, Universitas Darma Persada.

Pembimbing : Syamsul Bachri, M. Si



Pembaca : Erni Puspitasari, MPd



Ketua Jurusan : Hari Setiawan, M.A



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah di ujikan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012

Oleh

DEWAN PENGUJI

yang terdiri dari:

Pembimbing : Syamsul Bachri, M. Si

Pembaca : Hri Puspitasari, MPd

Ketua Penguji : Dra. Yuliasih Ibrahim

(Handwritten signatures of the examiners)

Disahkan pada hari tanggal

Ketua Program Studi,

Hari Setawan, M.A

Dekan,

FAKULTAS BAHSA
Syamsul Bachri, M.Si

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati penulis memanjatkan puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul:

“KETERLIBATAN YAKUZA DALAM PERPOLITIKAN JEPANG DARI TAHUN 1945-1984”

Penulisan Skripsi ini merupakan tugas akhir penulis dalam menyelesaikan semester akhir untuk meraih gelar sarjana Si Sastra Jepang Universitas Darma Pesada. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyusun Skripsi ini, penulis memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Syamsul Bachri, M.Si selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan serta koreksi sehingga penulisan skripsi ini dapat tersusun.
2. Ibu Erni Puspitasari, M.Pd selaku dosen pembaca yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini dapat tersusun.
3. Ibu Dra. Yuliasih Ibrahim selaku ketua dalam sidang skripsi.
4. Bapak Hari Setiawan, MA selaku Ketua Jurusan Program Studi Bahasa dan Sastra Jepang Universitas Darma Persada.
5. Bapak Syamsul Bachri, M.Si selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Darma Persada.
6. Seluruh staff pengajar Universitas Darma Persada yang telah memberikan bekal ilmu dan bimbingan belajar selama penulis menjalani perkuliahan. Para staff karyawan Tata Usaha Fakultas Sastra Universitas Darma Persada yang telah banyak membantu saya.

7. Keluarga saya tercinta, terutama papa dan mama terima kasih atas seluruh cinta dan kasihmu, perjuangan yang telah membesarkan dan mendidik serta memberikan perlindungan dengan segala kasih sayang dan memberi dukungan secara moril dan materil, serta abang ku Irvan Rosidi dan adik ku Djalinus Rosidi yang selalu mau membantu saat penulis membuat skripsi ini.
8. Sahabat dan teman karib saya Adityo Dewangga, Hasbi ashidiqqin dan Alfania Louisesa, dan kawan-kawan lainnya yang selalu memberikan dukungan moril kepada penulis.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu, namun telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Sepenuhnya saya sadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan pikiran dari penulis kepada pembaca di Universitas Darma Persada.

Jakarta, Juli 2012

Arief Fadhilah R

ABSTRAK

Nama : Arief Fadhilah Rosidi
Program Studi : Bahasa dan Sastra Jepang
Judul : Keterlibatan Yakuza Dalam Perpolitikan Jepang dari
Tahun 1945-1984

Yakuza pada mulanya terbentuk dari golongan penjudi dan pedagang keliling. Sejak abad ke-18, yakuza telah terlibat dalam perpolitikan di Jepang. Karena itu banyak calon-calon perdana menteri yang ingin menuju puncak kekuasaan meminjam uang kepada yakuza, bahkan ada yang sengaja meminta yakuza sebagai juru kampanye mereka.

Yakuza dan politikus Jepang mempunyai hubungan yang saling menguntungkan. Keuntungan yang didapat seorang politikus dengan bekerjasama dengan yakuza adalah kemenangan dalam pemilihan yg diikutinya. Sementara kelompok yakuza akan mendapatkan fasilitas dan keamanan dalam menjalankan bisnis ilegalnya tanpa ada gangguan dari pihak berwenang.

Keyword: Yakuza, politik, kekuasaan, uang.

内容

名前：アリフ ファチラ ロシチ

学部：日本語学科

題名：1945から1984まで年に 政治における日本のヤクザの関係する。

ヤクザグループはもとどギョラ一と行商人から形成された。一八世紀以降、ヤクザは日本の政治に関与されている。それから、多くの電源には来たい首相になるはず、ヤクザにお金を借りる。故意に彼らの活動家としてヤクザが存在母ねている。

ヤクザは日本の政治家と相互に有益な関係を持っている。ヤクザと協んで政治家のメリットしては選挙での勝利です。その間、ヤクザのグループが当局から干渉ないし、彼の違法なビジネスを実行する際の設備とセキュリティを取得している。

キーワード：ヤクザ、政治、電源、お金。

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERNYATAAN	i
HAL. PERSETUJUAN LAYAK UJI	i
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Pembatasan Masalah	3
1.4 Perumusan Masalah	4
1.5 Tujuan Penelitian	4
1.6 Landasan Teori	4
1.7 Metode Penelitian	7
1.8 Manfaat Penelitian.....	7
1.9 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II. KELOMPOK-KELOMPOK TERORGANISIR DAN PENAMAAN YAKUZA	
2.1 Bakuto dan Tekiya	8
2.2 Sistem Oyabun-Kobun.....	12
2.3 Touyama Mitsuru dan Awal Hubungan Yakuza dengan Perpolitikan di Jepang	16

BAB III. KETERLIBATAN YAKUZA DALAM PERPOLITIKAN DI JEPANG**DARI TAHUN 1945-1984**

3.1 Yakuza Pada Masa Pendudukan Amerika.....	26
3.2 Kodama Yoshio	29
3.3 Keterlibatan Yakuza Dalam Perpolitikan di Jepang Tahun 1945-1984	33
3.3.1 Lockheed Corporation.....	41
3.3.2 Yakuza Politikus.....	52

BAB IV. KESIMPULAN

Kesimpulan	59
------------------	----

GLOSSARY.....	62
----------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA.....	65
----------------------------	-----------

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Selama kurang lebih 250 tahun kepulauan Jepang dengan sadar mengisolasi diri dari hubungannya dengan bangsa-bangsa lain oleh kekuasaan *shogun* Tokugawa. Politik isolasi atau politik *sakoku*, adalah situasi dimana negara melarang perdagangan dan lalu lintas dengan luar negeri (politik isolasi negeri).

Karena politik isolasi ini, Jepang mengalami perkembangan. Petani menjadi kaya raya karena dengan memperluas sawah dan ladang, memperbaiki peralatan bertani, dan menambah jenis pertanian selain beras misalnya sutra, kapas, minyak dan biji-bijian, para petani pun menjual barang-barang industri kerajinan tangan seperti tenunan sutra, sake, kertas, dari berbagai daerah kepada kaum pedagang. Selama masa *sakoku* kekuasaan politik ada pada *shogun*, yaitu penguasa militer tertinggi di Jepang. *Shogun* yang memerintah Jepang pada saat itu adalah keluarga Tokugawa. Pemerintahan Tokugawa memperoleh kekuasaan dari Tenno Heika atau Kaisar Heika yang menjadi simbol kesatuan Jepang dan pendeta tertinggi dalam agama Shinto (<http://id.wikipedia.org>).

Tokugawa menetapkan bahwa yang harus memerintah Jepang adalah para jenderal atau *shogun* keturunan Tokugawa. Kaisar hanya menjadi lambang sedangkan pemegang pemerintahan terpusat pada *shogun*.

Pada saat Tokugawa berkuasa, pusat kekuasaan politik terpisah dari tempat kediaman Kaisar. Tokugawa menempatkan istananya di Edo (yang sekarang bernama Tokyo), sedangkan istana Kaisar berada di Kyoto yang tetap dianggap ibu kota Jepang pada saat itu.

Shogun ke-3 yang bernama Tokugawa Iemitsu mengeluarkan kebijakan *sankin kotai* yaitu kebijakan yang memerintahkan istri dan anak dari Daimyo untuk tinggal di Edo, sementara para Daimyo harus pergi pulang setiap satu tahun sekali antara wilayahnya dan Edo.

Sistem *shankin kotai* membuat perekonomian para *Daimyo* atau tuan tanah menjadi sulit sehingga tidak dapat memiliki kekuatan untuk melawan pemerintahan Tokugawa. Pada masa ini kondisi Jepang belum stabil, karena berada dalam masa damai, sekitar 500.000 (lima ratus ribu) samurai menganggur, padahal keahlian mereka adalah ketenteraan dan seni bela diri (<http://majalahtempointeraktif.com>).

Akibat pengaruh kebijakan *shankin kotai*, perkembangan industri transportasi menjadi ramai dan jalan-jalan pun bertambah. Dengan berpusat di Edo, dibangun lima jalan raya seperti jalan raya Tokaido yang menyusuri pantai menuju Kyoto, jalan raya Koshukaido yang menuju Koshu (Yamanashi-ken), jalan raya Oshukaido yang menuju Oshu (Tohokuchiho), dan Nikkōkaido jalan raya yang menuju Nikko.

Pada masa ini pedesaan seperti Osaka dan kota Kastil (Edo) seperti Tokyo dan Nagoya berubah menjadi pusat kota yang ramai. Sejalan dengan perkembangan lalu lintas dan perdagangan di Edo yang menjadi pusat pemerintahan, muncul pedagang-pedagang besar seperti Konoike dari Osaka dan Mitsui dari Edo. Sebagian besar samurai yang menganggur pada masa ini berganti pekerjaan menjadi pedagang, pekerja pemerintah, dan ada juga yang menjadi cendekiawan dan filsuf (Surajaya, 1993: 47).

Di lain pihak, ada juga samurai yang mulai menteror penduduk desa, karena banyak yang menganggur pada masa damai ini. Bandit-bandit samurai ini dikenal dengan nama *kabukimono*. Biasanya mereka selalu mengenakan pakaian yang aneh.

Para *kabukimono* ini gemar melakukan terror terhadap penduduk kota untuk mempraktekkan *tsujigiri*. *Tsujigiri* adalah ritual dimana seorang samurai akan menyerang penduduk desa yang kebetulan melintas hanya untuk menguji ketajaman pedangnya.

Anggota *kabukimono* adalah kelompok kriminal yang melegenda di Jepang pada abad pertengahan. Mereka adalah samurai eksentrik yang juga dikenal sebagai *hatamoto yakku* atau *ubdi shogun*. Mereka menggunakan bahasa yang sangat kasar dan nama-nama yang aneh untuk kelompoknya.

Walaupun para *hatamoto yakko* terlihat seperti nenek moyang sejati dunia hitam Jepang (*Yakuza*), tetapi *Yakuza* modern saat ini tidak mengidentifikasi dirinya sebagai *hatamoto yakko*. *Yakuza* saat ini justru mengidentifikasi dirinya dengan musuh *hatamoto yakko* yaitu *machi yakko* atau pelayan kota.

Machi yakko adalah sekelompok pemuda kota yang bergabung untuk menghadapi serangan para *hatamoto yakko* yang semakin meresahkan penduduk. Para pemimpin *machi yakko* berasal dari berbagai kalangan berbeda, seperti juru tulis, pemilik toko, pemilik penginapan, atau seniman.

Para *machi yakko* ini biasanya pandai berjudi, dan mereka juga membangun hubungan akrab dengan pemimpin mereka, hal ini yang menjadi contoh awal kelompok *Yakuza* yang terorganisasi dengan baik.

Pada saat pemerintahan *shogun* ke-15 Tokugawa Yoshinobu, kelompok *machi yakko* telah berkembang menjadi kelompok-kelompok "geng" terorganisir. Salah satunya adalah kelompok *bakuto* (penjudi) dan *tekiya* (pedagang keliling). Perlahan-lahan kelompok tersebut mulai membangun ikatan erat dengan pejabat dan petinggi penting pemerintahan.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui motif kelompok *yakuza* dalam dunia politik. Dan dalam hal ini penulis ingin mengambil tema **Keterlihatan *Yakuza* Dalam Dunia Perpolitikan Jepang Sejak Tahun 1945-1984**

1.2 Identifikasi masalah

Dari latar belakang masalah di atas penulis mengidentifikasi bahwa pada saat akhir rezim Tokugawa mulai terbentuk kelompok-kelompok terorganisir yang mendekati pejabat dan petinggi pemerintah. Oleh karena itu penulis berasumsi bahwa *Yakuza* mulai terbentuk pada jaman ini, dan mulai memasuki perpolitikan Jepang.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis membatasi masalah hanya pada keterlibatan *Yakuza* dalam politik di Jepang sejak tahun 1945-1984.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka saya dapat merumuskan masalahnya apakah benar asumsi penulis bahwa *Yakuza* mulai terbentuk sejak jaman pemerintahan Tokugawa. Dan untuk menjawab pertanyaan asumsi tersebut maka penulis membuat rumusan pertanyaan secara lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk kelompok terorganisasi di Jepang?
- b. Siapa tokoh kelompok terorganisasi di Jepang?
- c. Apa bentuk keterlibatan Yakuza dalam perpolitikan setelah kekalahan Jepang dalam perang dunia II?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah penulis ingin memaparkan tentang :

1. Untuk mengetahui awal mula terbentuknya kelompok terorganisasi di Jepang.
2. Untuk mengetahui tokoh dibalik kelompok terorganisasi di Jepang.
3. Untuk mengetahui keterlibatan Yakuza dalam perpolitikan Jepang setelah Perang Dunia II.

1.6 Landasan Teori

Definisi Yakuza

Istilah *yakuza* berasal dari skor terburuk yang bisa diperoleh dalam permainan *hanafuda* atau kartu bunga. Dalam permainan tersebut setiap pemain mendapatkan tiga kartu, nomor yang mereka pegang adalah digit terakhir dari jumlah angka keseluruhan. Para pemain berusaha untuk mendapatkan jumlah kartu yang mendekati angka 19 tidak lebih. Sebaliknya, para pemain berusaha untuk menghindari penjumlahan kartu yang berjumlah 20, salah satu kombinasi terburuk adalah angka 8, 9 dan 3 atau dalam bahasa Jepang disebut *ya - ku - sa*.

Kombinasi *ya - ku - sa* kemudian digunakan secara luas di kalangan "geng" penjudi untuk menunjukkan sesuatu yang tidak berguna. Selama bertahun-tahun penggunaan istilah *yakuza* hanya terbatas pada geng *hakuto*, namun memasuki abad ke-20 sedikit demi sedikit istilah *yakuza* mulai digunakan secara

luas oleh masyarakat untuk menyebut *bakuto*, *tekya* dan kelompok-kelompok kejahatan terorganisasi lainnya di Jepang (Hideo, 1972: 125).

1.6.1 Teori Politik

Politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis (Budiardjo, 2008: 15).

Menurut Merkl (1967: 13)

"Politics at its worst is a selfish grab for power, glory and riches". Politik dalam bentuk yang paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri.

Berbeda dengan pendapat Merkl, menurut Hague, et al (19983)

"Politic is the activity by which groups reach binding collective decisions through attempting to reconcile differences among their members". Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya.

Berbeda dengan Hague, Menurut Heywood (1997: 4)

"Politic is the activity through which a people make, preserve and amend the general rules under which they live and as such is inextricably linked to the phenomenon of conflict and cooperation". Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama.

1.6.2 Konsep Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seorang pelaku untuk mempengaruhi perilaku seorang pelaku lain, sehingga perilakunya menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan (Budiardjo, 2008: 60).

Menurut Kaplan (1950: 74)

“Power is a relationship in which one person or group is able to determine the action of another in the direction of the former’s own end’s”. Kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama.

Senada dengan Kaplan, menurut Goodwin (2003: 307)

“Force is the ability to cause someone to act in a way which she would not choose, left to herself. In other words to force someone to do something against her will”. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengakibatkan seseorang bertindak dengan cara yang oleh yang bersangkutan tidak akan dipilih, seandainya ia tidak dilibatkan. Dengan kata lain memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya.

Berbeda dengan Goodwin, menurut Parsons (1957: 139)

“Power then is generalized capacity to secure the performance of binding obligations by unit in a system of collective organization when the obligations are legitimized with reference to their bearing on collective goals, and where in case of recalcitrancy there is a presumption of enforcement by negative situational sanctions-whatever the agency of the enforcement”. Kekuasaan adalah kemampuan untuk menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban yang mengikat, oleh kesatuan-kesatuan dalam suatu sistem organisasi yang kolektif. Kewajiban adalah sah jika

menyangkut tujuan-tujuan kolektif. Jika ada perlawanan, maka pemaksaan melalui sanksi-sanksi negatif dianggap wajar, terlepas dari siapa yang melaksanakan pemaksaan itu.

1.7 Metode Penelitian

Dalam penulisan ini penelitian bersifat kualitatif dengan metode kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah sumber tertulis seperti buku-buku dan bahan penunjang lainnya yang relevan sesuai dengan perumusan masalah. Data disusun melalui penelitian kepustakaan serta pengkajian dari umum ke khusus.

1.8 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan membantu para pembaca yang ingin mengetahui lebih banyak tentang *yakuza* dan keterlibatannya dalam politik di Jepang. Penelitian ini akan semakin bermanfaat bila dilakukan penelitian lanjutan.

1.9 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini akan dikembangkan sebagai berikut :

- BAB I** : Pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
- BAB II** : Berisi tentang sejarah kemunculan *yakuza*, sistem *oyabun-kobun* dan Touyama Mitsuru.
- BAB III** : Berisi tentang peranan *yakuza* dalam perpolitikan di Jepang dari tahun 1945-1984.
- BAB IV** : Kesimpulan.